

**TINGKAT KEMISKINAN DI INDONESIA TAHUN 2005-2006****RINGKASAN**

- ✎ Jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan) di Indonesia pada bulan Maret 2006 sebesar 39,05 juta (17,75 persen). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada Februari 2005 yang berjumlah 35,10 juta (15,97 persen), berarti jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 3,95 juta.
- ✎ Persentase penduduk miskin antara daerah perkotaan dan perdesaan tidak banyak berubah. Pada bulan Maret 2006, sebagian besar (63,41 persen) penduduk miskin berada di daerah perdesaan.
- ✎ Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Pada bulan Maret 2006, sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan sebesar 74,99 persen.
- ✎ Komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai Garis Kemiskinan adalah beras, gula pasir, minyak kelapa, telur dan mie instant. Untuk komoditi bukan makanan adalah biaya perumahan. Khusus untuk daerah perkotaan, biaya listrik, angkutan dan minyak tanah mempunyai pengaruh yang cukup besar, sementara untuk daerah perdesaan pengaruhnya relatif kecil (kurang dari 2 persen).
- ✎ Terjadi pergeseran posisi penduduk miskin dan hampir miskin selama periode Februari 2005-Maret 2006. Sekitar 56,51 persen penduduk miskin pada bulan Februari 2005 tetap tergolong sebagai penduduk miskin pada Maret 2006, sisanya berpindah posisi menjadi tidak miskin. Sebaliknya, 30,29 persen penduduk hampir miskin di bulan Februari 2005 jatuh menjadi miskin pada bulan Maret 2006. Pada saat yang sama, 11,82 persen penduduk hampir tidak miskin di bulan Februari 2005 juga jatuh menjadi miskin pada bulan Maret 2006. Bahkan 2,29 persen penduduk tidak miskin juga terjatuh menjadi miskin di bulan Maret 2006. Perpindahan posisi penduduk ini menunjukkan jumlah kemiskinan sementara (*transient poverty*) cukup besar.

1. Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Indonesia, 1996-2005

Jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode 1996-2005 berfluktuasi dari tahun ke tahun meskipun terlihat adanya kecenderungan menurun pada periode 2000-2005 (Tabel 1).

Pada periode 1996-1999 jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 13,96 juta karena krisis ekonomi, yaitu dari 34,01 juta pada tahun 1996 menjadi 47,97 juta pada tahun 1999. Persentase penduduk miskin meningkat dari 17,47 persen menjadi 23,43 persen pada periode yang sama.

Pada periode 1999-2002 terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 9,57 juta, yaitu dari 47,97 juta pada tahun 1999 menjadi 38,40 juta pada tahun 2002. Secara relatif juga terjadi penurunan persentase penduduk miskin dari 23,43 persen pada tahun 1999 menjadi 18,20 persen pada tahun 2002.

Penurunan jumlah penduduk miskin juga terjadi pada periode 2002-2005 sebesar 3,3 juta, yaitu dari 38,40 juta pada tahun 2002 menjadi 35,10 juta pada tahun 2005. Persentase penduduk miskin turun dari 18,20 persen pada tahun 2002 menjadi 15,97 persen pada tahun 2005.

Tabel 1.
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia
Menurut Daerah, 1996-2005

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Juta)			Persentase Penduduk Miskin		
	Kota	Desa	Kota+Desa	Kota	Desa	Kota+Desa
1996	9,42	24,59	34,01	13,39	19,78	17,47
1998	17,60	31,90	49,50	21,92	25,72	24,23
1999	15,64	32,33	47,97	19,41	26,03	23,43
2000	12,30	26,40	38,70	14,60	22,38	19,14
2001	8,60	29,30	37,90	9,76	24,84	18,41
2002	13,30	25,10	38,40	14,46	21,10	18,20
2003	12,20	25,10	37,30	13,57	20,23	17,42
2004	11,40	24,80	36,10	12,13	20,11	16,66
2005	12,40	22,70	35,10	11,37	19,51	15,97

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

2. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Februari 2005-Maret 2006

Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada bulan Maret 2006 sebesar 39,05 juta (17,75 persen). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada Februari 2005 yang berjumlah 35,10 juta (15,97 persen), berarti jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 3,95 juta. Pertambahan penduduk miskin di daerah perdesaan sedikit lebih tinggi dari pada daerah perkotaan. Selama periode Februari 2005-Maret 2006, penduduk miskin di daerah perdesaan bertambah 2,06 juta, sementara di daerah perkotaan bertambah 1,89 juta orang (Tabel 2).

Persentase penduduk miskin antara daerah perkotaan dan perdesaan tidak banyak berubah. Pada bulan Februari 2005, sebagian besar (64,67 persen) penduduk miskin berada di daerah perdesaan, sementara pada bulan Maret 2006 persentase ini turun sedikit menjadi 63,41 persen.

Tabel 2.
Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah, Februari 2005 – Maret 2006

Daerah/Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bln)			Jumlah penduduk miskin (juta)	Persentase penduduk miskin
	Makanan	Bukan Makanan	Total		
<u>Perkotaan</u>					
Februari 2005	103 992	46 807	150 799	12,40	11,37
Maret 2006	126 527	48 797	175 324	14,29	13,36
<u>Perdesaan</u>					
Februari 2005	84 014	33 245	117 259	22,70	19,51
Maret 2006	103 180	28 076	131 256	24,76	21,90
<u>Kota+Desa</u>					
Februari 2005	91 072	38 036	129 108	35,10	15,97
Maret 2006	114 619	38 228	152 847	39,05	17,75

Sumber: Diolah dari data Susenas Panel Februari 2005 dan Maret 2006

3. Perubahan Garis Kemiskinan Februari 2005-Maret 2006

Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan, karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata

pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan. Semakin tinggi Garis Kemiskinan, semakin banyak penduduk yang tergolong sebagai penduduk miskin.

Selama Februari 2005-Maret 2006, Garis Kemiskinan naik sebesar 18,39 persen, yaitu dari Rp.129.108,- per kapita per bulan pada Februari 2005 menjadi Rp.152.847,- per kapita per bulan pada Maret 2006. Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan-Makanan (GKBM), terlihat bahwa peranan komoditi makanan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Pada bulan Februari 2005, sumbangan GKM terhadap GK sebesar 70,54 persen, tetapi pada bulan Maret 2006, peranannya meningkat sampai 74,99 persen. Meningkatnya peranan GKM terhadap GK ini sebagian besar akibat naiknya harga barang-barang kebutuhan pokok yang juga digambarkan oleh inflasi umum sebesar 17,95 persen selama periode Februari 2005-Maret 2006.

Komoditi yang paling penting bagi penduduk miskin adalah beras. Pada bulan Maret 2006, persentase pengeluaran beras terhadap total pengeluaran sebulan untuk penduduk miskin sebesar 23,10 persen, bahkan di daerah perdesaan persentase ini mencapai 26,08 persen. Sumbangan pengeluaran beras terhadap Garis Kemiskinan mencapai 34,91 persen di perdesaan dan 25,98 persen di perkotaan. Dengan demikian kenaikan harga beras akan berpengaruh besar kepada penduduk miskin. Selain beras, barang-barang kebutuhan pokok lain yang berpengaruh besar terhadap Garis Kemiskinan adalah gula pasir (4,66 persen di perdesaan, 3,88 persen di perkotaan), minyak kelapa (2,47 persen di perdesaan, 1,98 persen di perkotaan), telur (1,81 persen di perdesaan, 2,70 persen di perkotaan), dan mie instant (2,01 persen di perdesaan, 2,14 persen di perkotaan).

Untuk komoditi bukan makanan, biaya perumahan mempunyai peranan yang besar, yaitu 6,27 persen di perdesaan dan 6,54 persen di perkotaan. Biaya untuk listrik, angkutan dan minyak tanah mempunyai pengaruh yang cukup besar untuk daerah perkotaan, yaitu masing-masing sebesar 3,60 persen, 3,20 persen dan 2,46 persen, sementara untuk daerah perdesaan pengaruhnya relatif kecil (kurang dari 2 persen).

4. Pergeseran Penduduk Miskin Februari 2005-Maret 2006

Terjadi pergeseran posisi penduduk miskin dan hampir miskin selama periode Februari 2005-Maret 2006 (Tabel 3). Sekitar 56,51 persen penduduk miskin pada bulan Februari 2005 tetap tergolong sebagai penduduk miskin pada Maret 2006, tetapi sisanya berpindah posisi menjadi hampir miskin (19,37 persen), hampir tidak miskin (17,66 persen) dan tidak miskin (6,45 persen).

Hal ini bisa terjadi karena secara umum penduduk miskin dapat dibedakan menjadi dua yaitu miskin kronis (*chronic poor*) dan miskin sementara (*transient poor*). Miskin kronis adalah penduduk miskin yang berpenghasilan jauh di bawah garis kemiskinan dan biasanya tidak memiliki akses yang cukup terhadap sumber daya ekonomi, sedangkan miskin sementara adalah penduduk miskin yang berada dekat garis kemiskinan. Jika terjadi sedikit saja perbaikan dalam ekonomi, kondisi penduduk yang termasuk kategori miskin sementara ini bisa meningkat dan statusnya berubah menjadi penduduk tidak miskin.

Pergeseran posisi penduduk miskin pada periode Februari 2005-Maret 2006 ini dapat dicermati dari distribusi pengeluaran penduduk pada kelompok 40 persen terendah. Rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dari kelompok penduduk 40 persen terendah (desil 1- desil 4) menunjukkan peningkatan selama Februari 2005-Maret 2006. Pada desil 1, rata-rata pengeluaran per kapita per bulan naik 44,43 persen (Rp.45.970,-), pada desil 2 naik 30,87 persen (Rp. 42.115,-), pada desil 3 meningkat 27,45 persen (Rp. 44.206,-), dan pada desil 4 naik 25,21 persen (Rp. 46.146,-). Adanya peningkatan pengeluaran yang cukup besar ini menyebabkan status mereka berubah dari miskin menjadi menjadi tidak miskin. Program PKPS-BBM berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan kepada rumah tangga miskin dan hampir miskin sebesar Rp. 100.000,- per bulan (sekitar Rp. 25.000,-/orang/bulan), diduga merupakan salah satu sumber pendapatan yang diperoleh rumah tangga miskin untuk menutupi peningkatan pengeluaran akibat kenaikan harga-harga kebutuhan pokok.

Perubahan besar terjadi pada penduduk hampir miskin dan hampir tidak miskin. Sekitar 30,29 persen penduduk hampir miskin di bulan Februari 2005 jatuh menjadi miskin pada bulan Maret 2006. Pada saat yang sama, 11,82 persen penduduk hampir tidak miskin di bulan Februari 2005 juga jatuh menjadi miskin pada bulan Maret 2006. Bahkan 2,29 persen penduduk tidak miskin juga terjatuh menjadi miskin di bulan Maret 2006. Dengan demikian, jumlah penduduk miskin pada bulan Maret

2006 yang sebesar 39,1 juta berasal dari penduduk miskin lama (19,8 juta), penduduk hampir miskin (9,9 juta), penduduk hampir tidak miskin (7,3 juta) dan penduduk tidak miskin (2,1 juta) yang terjatuh menjadi miskin pada bulan Maret 2006.

Dengan memperhatikan pergeseran posisi ini, dapat disimpulkan bahwa penambahan jumlah penduduk miskin selama periode Februari 2005-Maret 2006 terjadi karena adanya pergeseran penduduk yang penghasilannya berada tidak jauh dari garis kemiskinan. Diharapkan ini hanya bersifat sementara.

Tabel 3.
Pergeseran Penduduk Miskin, Februari 2005-Maret 2006 (persen)

Kondisi Feb 2005	Kondisi Maret 2006				TOTAL
	Miskin	Hampir Miskin	Hampir Tidak Miskin	Tidak Miskin	
Miskin	56,51	19,37	17,66	6,45	100
Hampir Miskin	30,29	26,37	30,76	12,58	100
Hampir Tidak Miskin					100
Miskin	11,82	16,22	41,00	30,96	
Tidak Miskin	2,29	3,60	21,77	72,34	100
TOTAL	17,75	13,02	27,84	41,39	100

Sumber: Diolah dari data Susenas Panel Februari 2005 dan Maret 2006

Catatan:

/// Miskin : < GK (Garis Kemiskinan)

/// Hampir Miskin : 1,00-1,25 GK

/// Hampir Tidak Miskin : 1,25-1,50 GK

/// Tidak Miskin : >1,50 GK

5. Penjelasan Teknis dan Sumber Data

a. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan pendekatan ini, dapat dihitung *Head Count Index* (HCI), yaitu persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan.

b. Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan-Makanan (GKBM). Penghitungan Garis Kemiskinan

dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan.

- c. Sumber data utama yang dipakai untuk menghitung kemiskinan adalah data SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional) Panel Februari 2005 dan Maret 2006. Sebagai informasi tambahan, juga digunakan hasil survei SPKKD (Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar), yang dipakai untuk memperkirakan proporsi dari pengeluaran masing-masing komoditi pokok bukan makanan.

6. Angka Kemiskinan Susenas dan Program BLT

- a. Data kemiskinan hasil Susenas yang menghasilkan angka penduduk miskin sebesar 39,05 juta pada bulan Maret 2006, merupakan data kemiskinan yang bersifat makro. Data ini hanya menunjukkan jumlah agregat dan persentase penduduk miskin, tetapi tidak dapat menunjukkan siapa si miskin dan dimana alamat mereka, sehingga kurang operasional di lapangan. Meskipun demikian, karena pendataan kemiskinan Susenas dilakukan setiap tahun, maka selama ini secara konsisten (*apple to apple*) digunakan untuk mengevaluasi pertambahan/pengurangan jumlah penduduk miskin.
- b. Untuk menyalurkan BLT (Bantuan Langsung Tunai) dalam rangka kompensasi BBM, diperlukan data mikro rumah tangga "miskin" yang memuat informasi nama kepala rumah tangga yang berhak menerima BLT dan lokasi tempat tinggalnya (rinci menurut nama dan alamat). Upaya penyediaan data mikro ini dilakukan BPS dengan melaksanakan Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk (PSE). Karena program BLT menghendaki manfaat yang lebih luas bagi rumah tangga yang terkena dampak kenaikan harga BBM, maka sasarannya tidak saja pada rumah tangga sangat miskin dan miskin, tetapi juga pada rumah tangga yang mendekati miskin. Jumlah rumah tangga yang berhak menerima BLT adalah 19,2 juta rumah tangga.
- c. Berbeda dengan metode Susenas yang mengukur kemiskinan dengan menggunakan pendekatan kebutuhan dasar makanan (setara 2100 kalori per kapita per hari) dan bukan makanan (variabel kuantitatif), penentuan rumah tangga penerima BLT didasarkan pada pendekatan karakteristik rumah tangga dengan menggunakan 14 variabel kualitatif penjelas kemiskinan. Ke 14 variabel yang digunakan adalah luas lantai per kapita, jenis lantai, jenis dinding,

fasilitas tempat buang air besar, sumber air minum, sumber penerangan, bahan bakar, membeli daging/ayam/susu, frekuensi makan, membeli pakaian baru, kemampuan berobat, lapangan usaha kepala rumah tangga, pendidikan kepala rumah tangga, dan aset yang dimiliki rumah tangga. Karena tujuan dan metode pengumpulan data yang digunakan berbeda, maka data kemiskinan Susenas tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan data PSE.